



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RENJA 2024

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana kerja ini adalah Dokumen Resmi Pemerintah Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 1 (satu) tahun yaitu 2024 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan OPD Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu kepada Program Prioritas Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama yaitu Program Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas, dan Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di Kawasan perbatasan Provinsi Papua.

Akhirnya, kami harapkan kiranya dokumen ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) kedalam Rencana Regional dan selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pembangunan Daerah (APBD).

Jayapura, 03 Oktober 2023

**Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Dan Kerjasama Provinsi Papua,**



Suzana D. Wanggai, S.Pd., MSocSc
Pembina Utama Madya
Nip. 19680821 199610 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	5
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2020	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 2021 dan Capaian Renstra SKPD ...	5
2.2 Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	39
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III.....	52
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran	52
3.3 Program dan Kegiatan	55
3.3.1 Program dan Kegiatan BPPK Provinsi Papua	55
3.3.2 Rencana Program Kegiatan Tahun 2024	66
BAB IV	76
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	76
BAB V.....	77
PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023.....	6
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama	40
3. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	42
4. Tabel 3.1 Program dan Kegiatan BPPK Provinsi Papua	56
5. Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2024.....	67

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan bagian integral dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang Pemerintah Provinsi Papua. Rencana kerja Perangkat Daerah harus memuat informasi-informasi penting yang akan dikerjakan pada satu tahun ke depan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, yang merupakan dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, dan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program prioritas pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, karena secara substansi merupakan Penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RENJA merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan dalam KUA dan PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, seperti apa yang dimanakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 39 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Papua 2019-2024;
18. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2019-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENJA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua s/d tahun 2023 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2023 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n- 3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Progra m/k egiatan Renja SKPD Tahun 2022 (n- 1)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Cata -tan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)*1 00 %	9	10 =(5+7+9)	11 =10/4)* 1 00%	
4.01 . 1	Program Pelayana n Administ rasi Perkantor an										
4.01 . 1 . 1	Penyediaan jasasurat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2500 Surat	1000 Surat	500 Surat	500 Surat	100%	500 Surat	2000 Surat	80%	

4.01 . 1 . 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik, Air, Telepon, Transponder	120 layanan	48 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100%	12 Rekening	96 Layanan	80%	
4.01 . 1 . 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	160 Unit	30 Unit	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	54 Jenis	34%	
4.01 . 1 . 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya	192 Unit	48 Unit	42 Unit	42 Unit	100%	42 Unit	132 Unit	69%	
4.01 . 1 . 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang terbayarkan	36 Orang	12 Orang	0	0	0%	0	12 Orang	33%	
4.01 . 1 . 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	15 Orang	6 Orang	36 Orang	36 Orang	100%	6 Orang	48 Orang	320%	
		Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan	92 Jenis	40 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Jenis	80 Jenis	87%	

4.01 . 1 . 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	258 Unit	92 Unit	0 Unit	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 1 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	143 Jenis	60 Jenis	30 Jenis	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 1 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	Jumlah barang cetakan	65 Jenis	20 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	15 Jenis	50 Jenis	77%	
		Jumlah penggunaan	600.000 Lembar	240.000 Lembar	120.000 Lembar	120.000 Lembar	100%	120.000 Dokumen	480.000 Lembar	80%	
4.01 . 1 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	45 Buah	20 Buah	10 Jenis	10 Jenis	100 %	10 Jenis	40 Jenis	89%	
4.01 . 1 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	145 Unit	60 Unit	12 Jenis	12 Jenis	100 %	0	72 Jenis	50%	

4.01 . 1 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9600 Buku	4.000 Buku	20.000 Eksemplar	20.000 Eksemplar	100 %	14.400 Eksemplar	38.400 Eksemplar	400%	
4.01 . 1 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras ke kantor	60 kali	24 Kali	30 Jenis	30 Jenis	100 %	30 Jenis	84 Jenis	140%	
4.01 . 1 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	1200 kali Tahun	480 Kali Tahun	0 Kali	24 Kali	0%	48 Kali	552 Kali	46%	
		Pelaksanaan makan minum saat olah raga(hari Jumat)	268 Kali	108 Kali	0 Kali	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 1 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	365 Kali	140 Kali	70 Kali	0	0%	0	0	0%	
		Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	0		6000 porsi	6000 porsi	100 %	6000 porsi	12000 Porsi	100%	

		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	0		114 Orang	114 Orang	100 %	114 Orang	228 Orang	100%	
4.01 . 1 . 19	Penyediaan Jasa Pengamanan	Jumlah tenaga pengamanaan	2 Orang	2 Orang	36 Orang	36 Orang	100 %	0	38 Orang	100%	
4.01 . 2	Program peningkatan ansarana dan prasarana aparatur										
4.01 . 2 . 3	Pembangun angedung kantor	Luas bangunan yang dibangun	0 M2	0 M2	0 M2	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 2 . 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal	Jumlah kendaraan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0	0%	0	3 Unit	100%	
4.01 . 2 . 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	65 Unit	20 Unit	0 Unit	0	0%	0	20 Unit	31%	
4.01 . 2 . 9	Pengadaan peralatan gedungkantor	Jumlah peralatan perlengkapan	80 Unit	20 Unit	0 Unit	0	0%	0	20 Unit	25%	
4.01 . 2 . 10	Pengadaa n	Jumlah mebeleur	125 Unit	0 Unit	20 Jenis	20 Jenis	100	0	20 Unit	16%	

	mebeleur	yang diadakan					%				
4.01 . 2 . 22	Pemelihara an rutin/berkal a gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	12 Unit	80%	
4.01 . 2 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	50 Unit per Tahun	84 Unit	42 Unit	42 Unit	100 %	42 Unit	168 Unit	100%	
4.01 . 2 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	2 Kegiatan	40%	
4.01 . 2 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	40 Unit	120 Unit	100%	
4.01 . 2 . 29	Pemelihara an rutin/berkal a mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	100 Unit	20 Unit	0 Unit	0	0%	0	20 Unit	20%	
4.01 . 2 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				0	0	0%	0	0	0%	

4.01 . 2 . 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		0	0	0	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 2 . 46	Sewa gedung	Jumlah gedung kantor yang disewa	1 Unit Tahun	0 Unit Tahun	0 Unit Tahun	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 3	Program peningkatan disiplin aparatur					0	0%	0	0	0%	
4.01 . 3 . 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin /Kartu Absensi yang tersedia	2 Bh	0 Bh	0 Bh	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 3 . 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	440 Stell	140 Stell	60 Orang	60 Orang	100 %	60 Orang	260 Orang	59%	
4.01 . 3 . 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	370 Stell	140 Stell	60 Orang	0	0%	0	140 Orang	38%	

4.01 . 3 . 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	440 Stell	140 Stell	60 Orang	60 Orang	100 %	60 Orang	260 Orang	59%	
4.01 . 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					0	0%	0	0	0%	
4.01 . 5 . 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatuyang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	35 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100 %	10 Orang	30 Orang	86%	
4.01 . 5 . 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	750 Orang	300 Orang	60 Orang	60 Orang	100 %	60 Orang	420 Orang	56%	
4.01 . 5 . 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	100 Orang	0 Orang	0	0%	0	100 Orang	100%	

4.01 . 5 . 4	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	95 Orang	40 Orang	20 Orang	20 Orang	100 %	20 Orang	80 Orang	84%	
4.01 . 6	Program peningkatan pengembang ansistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					0	0%	0	0	0%	
4.01 . 6 . 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	15 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Dokumen	10 Laporan	67%	
4.01 . 6 . 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	10 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Dokumen	6 Laporan	60%	

4.01 . 6 . 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	60 Laporan	24 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100 %	5 Dokumen	42 Laporan	70%	
4.01 . 6 . 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun	Jumlah laporan keuangan akhirtahun yang disusun	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Dokumen	4 Laporan	80%	
4.01 . 6 . 5	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	2 Dokumen	11 Dokumen	73%	
4.01 . 6 . 10	Forum SKPD Provinsi Papua	Jumlah Peserta Forum	250 Orang	100 Orang	0 Orang	0	0%	0	100 Orang	40%	
4.01 . 6 . 12	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	1 Dokumen	50%	
4.01 . 6 . 13	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	1 DOkumen	50%	

4.01 . 6 . 14	Peningkatan Kapasitas PPID	Jumlah orang	50 Orang	20 Orang	0 Orang	0	0%	0	20 Orang	40%	
4.01 . 6 . 15	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	1 Dokumen	50%	
4.01 . 100	Program Pengelola an Infrastruktur Kawasan Perbatasan n	Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional	5 Lokasi	2 lokasi	0 Lokasi	0	0%	0	2 Lokasi	40%	
		Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	65 Persen		0	0	0%	0	0	0%	
		Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan	250 Murid per Sekolah		0	0	0%	0	0	0%	

		Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan	25 Murid per Guru		0	0	0%	0	0	0%	
		Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan	40 Murid per Kelas		0	0	0%	0	0	0%	
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan	1 Puskesmas per 1000 Penduduk		0	0	0%	0	0	0%	
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	60 Persen		0	0	0%	0	0	0%	
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	50 Persen		0	0	0%	0	0	0%	

4.01 . 100 . 1	Pembangunan Pos Pengamanan Batas RI-PNG	Tersesedianya Pos Pengamanan Batas RI-PNG	3 Unit	2 Unit	0 Unit	0	0%	0	2 Unit	67%	
4.01 . 100 . 2	Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan PPLBN	Tertata dan terpeliharanya lingkungan Pemeriksaan PosLintas Batas Negara (PPLBN)	10 Lokasi	2 Lokasi	0 Lokasi	0	0%	0	2 Lokasi	20%	
4.01 . 100 . 7	Pembangunan Pasar Tradisional di Kawasan Perbatasan	Tersediaya Pasar Tradisional di Kawasan Perbatasan	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0	0%	0	1 Unit	33%	
4.01 . 100 . 8	Pembangunan Balai Kampung di Kawasan Perbatasan	Tersedianya Balai Kampung di Kawasan Perbatasan	4 Unit	2 Unit	0 Unit	0	0%	0	2 Unit	50%	
4.01 . 100 . 9	Pemetaan Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pemetaan Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 11	Peningkatan Keterampilan Home Industry bagi Masyarakat	Terlatihnya keterampilan home industri bagi masyarakat	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0%	0	0	0%	

	Kawasan Perbatasan	pebatasan									
4.01 . 100 . 12	Pembangunan Balai Pertemuan	Jumlah gedung/unit yang terbangun	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 13	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur kawasan perbatasan	Tersedianya laporan hasil kordinasi pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	1 Kegiatan	20%	
4.01 . 100 . 14	Pengadaan Pemenuhan Air Bersih di kawasan perbatasan	Jumlah pemuhan air bersih di kawasan perbatasan	4 Lokasi	2 Lokasi	0 Lokasi	0	0%	0	2 Lokasi	50%	
4.01 . 100 . 15	Pengadaan dan pemasangan PLTS bagi Masyarakat Perbatasan	Jumlah solar cellyang diadakan	2 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 16	Iventarisasi dan Pemutakhiran data infrastruktur kawasan perbatasan	jumlah laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Laporan	100%	

4.01 . 100 . 17	Pembangunan Gedung Koperasi di Wlayah Perbatasan	Jumlah Gedung Koperasi yang dibangun	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 18	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kawasan Perbatasan	Jumlah Rumah yang Terbangun	100 Unit	25 Unit	0 Unit	0	0%	0	25 Unit	25%	
4.01 . 100 . 20	Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Pos Lintas Batas (PPLB)	Jumlah pos lintas batas yang dilakukan penataan	10 Unit	2 Unit	0 Unit	0	0%	0	2 Unit	40%	
4.01 . 100 . 21	Pembangunan Rumah Adat di Kawasan Perbatasan	Jumlah rumah adat yang terbangun	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 22	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Infrastruktur Kawasan	Jumlah dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	0	0%	

	Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT)										
4.01 . 100 . 23	Perencanaan Peningkatan Jalan Non Statusdi wilayah Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 24	Pembangunan Rumah Penampungan (singgah) sementara bagi Repatrian dan Warga yang Bermasalah	Jumlah rumah yang terbangun	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 25	Pembangunan Pos Terpadu Perbatasan (Pos PLB) Laut dan Darat di Merauke, Bouven Digoel dan	Jumlah Pos Perbatasan yang terbangun	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0	0%	0	1 Unit	33%	

	Kota Jayapura										
4.01 . 100 . 26	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan RI-PNG	Jumlah Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	3 Dokumen	23%	
4.01 . 100 . 27	Pembangunan Gapura Perbatasan dan Tower Pemantau di Kawasan RI-PNG	Jumlah unit yang terbangun	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 28	Penyusunan Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan PPKT	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 29	Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Ekonomi di	Jumlah yang terlatih	60 Orang	20 Orang	0 Orang	0	0%	0	20 Orang	33%	

	Kawasan Perbatasan										
4.01 . 100 . 30	Pembinaan Sanggar Budaya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Sanggar Budaya yang terbina	3 Kelompok	1 Kelompok	0 Kelompok	0	0%	0	1 Kelompok	33%	
4.01 . 100 . 31	Pameran Pembangunan dan Budaya Perbatasan	Jumlah Pameran	3 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	1 Kegiatan	33%	
4.01 . 100 . 32	RTRW Kawasan Perbatasan dan PPKT	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 33	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Perbatasan dan PPKT	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%	

4.01 . 100 . 34	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperdasi Tata Ruang dan Hak Ulayat di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	
4.01 . 100 . 35	Rapat Koordinasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Koridor Perbatasan yang Menghubungkan setiap Kab/Kota pada Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP)	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 36	Penyusunan RDTR Seluruh LOKPRI di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	25%	

4.01 . 100 . 37	Penyusunan RTBL Seluruh LOKPRI di Kawasan Perbatasan PPKT	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	
4.01 . 100 . 38	Pembebasan SD Lahan yang dipakai untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perbatasan	Jumlah lahan yang dibebaskan	1 Ha	0 Ha	0 Ha	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 39	Perencana Tapak Kawasan (Rencana Teknis Ruang Struktural) atau DED Pos Terpadu Perbatasan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	

4.01 . 100 . 40	Pembangunan Pasar Tradisional Pada masing-masing distrik LOKPRI	Jumlah pasar yang terbangun	6 Unit	2 Unit	0 Unit	0	0%	0	2 Unit	33%	
4.01 . 100 . 41	Pembangunan Fasilitas Pendukung Pasar (Terminal dan Pergudangan)	Jumlah pasar yang tersedia fasilitasnya	6 Unit	2 Unit	0 Unit	0	0%	0	2 Unit	33%	
4.01 . 100 . 42	Pembangunan Lokasi Pariwisata Sesuai dengan ODTW di Kawasan Perbatasan dan PPKT	Jumlah lokasi yang dikembangkan	4 Lokasi	2 Lokasi	0 Lokasi	0	0%	0	2 Lokasi	50%	
4.01 . 100 . 43	Pembangunan Pasar-pasar induk dan Tradisional di Kawasan Perbatasan	Jumlah pasar yang terbangun	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0%	0	0	0%	

4.01 . 100 . 44	Pembangunan Jalan Yetetkun (RI) - Ambaga (PNG), merupakan aksesibilitas perdagangan Perbatasan antar negara	Panjang jalan yang terbangun	1 km	0 km	0 Km	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 45	Sosialisasi Perpres No 32 tahun 2015 tentang rencanatata ruang kawasan perbatasan di Provinsi papua	Jumlah orang mendapatkan sosialisasi	50 orang	0 Orang	0 Orang	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 100 . 46	Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar antar negara di	Jumlah peserta rapat koordinasi	250 Orang	130 Orang	80 Orang	80 Orang	100 %	80 Orang	190 Orang	76%	

	Provinsi Papua										
4.01 . 100 . 47	Pembangunan Tambatan Perahu/Dermaga di kabupaten/Kota perbatasan PPKT	Tersedianya Dermaga di kabupaten/kota perbatasan PPKT	4 Unit	1 Unit	0 Unit	0	0%	0	1 Unit	25%	
4.01 . 101	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas					0	0%	0	0	0%	
4.01 . 101 . 3	Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat Perbatasan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lintas batas	480 Orang Lokasi	200 Orang Lokasi	100 Orang	0	0%	100 Orang	0	0%	
4.01 . 101 . 5	Joint Verifikasi Pelintas Batas Wilayah RI-PNG	Jumlah pelintas batas yang diverifikasi	1000 Orang	600 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	1200 Orang	100%	
4.01 . 101 . 13	Penataran Pengelola Perbatasan Satu Atap	Meningkatkan pola pikir dan pola tindak pejabat pengelola perbatasan dalam	200 Orang	50 Orang	0 Orang	0	0%	0	50 Orang	25%	

		implementasi kebijakan perbatasan									
4.01 . 101 . 14	Border Liasion Meeting (BLM) RI-PNG				1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen		
4.01 . 101 . 15	Border Liasion Officer Meeting (BLOM) RI-PNG				1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen		
4.01 . 101 . 16	Penjajakan Kerjasama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen		
4.01 . 101 . 17	Border Trade RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan	Meningkatnya Border Trade Fair RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	2 Kegiatan	50%	
4.01 . 101 . 18	Pelayanan Kunjungan Tamu Negara			0 Kali Tahun	0 Kali Tahun	0	0%	0	0	0%	

4.01 . 101 . 19	Joint Verifikasi pencemaran sungai Fly RI-PNG	Diketahuinya upaya penyelesaian pencemaran sungai fly RI-PNG	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.01 . 101 . 20	Joint Verifikasi permasalahan perbatasan RI-PNG	Diketahuinya upaya penyelesaian permasalahan perbatasan RI-PNG	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	
4.01 . 101 . 21	Penataran manajemen tingkat dasar, lanjut dan mahir pembina garda batas	Meningkatnya SDM Pembina Garda Batas Tk. Dasar, Lanjut dan Mahir	200 Orang	50 Orang	0 Orang	0	0%	0	50 Orang	25%	
4.01 . 101 . 22	Pemeliharaan Pilar batas RI-PNG	Terdatanya WNI asal Papua di PNG	4 Lokasi	1 Lokasi	2 Pilar	0	0%	0	1 Lokasi	25%	
4.01 . 101 . 23	Pendataan dan Verifikasi WNI asal Papua di PNG	Tertata dan Terpeliharaan WNI asal Papua di PNG	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	20%	

4.01 . 101 . 24	Pembinaan pelintas batas tradisional yang kembali ke RI	Terbinanya pelintas batas tradisional yang kembali ke RI	200 Orang	50 Orang	50 Orang	0	0%	0	50 Orang	25%	
4.01 . 101 . 25	Penanganan pemulangan repatrian asal Indonesia	Tertanganinya repatrian asal Indonesia	300 Orang	50 Orang	0 Orang	0	0%	0	50 Orang	17%	
4.01 . 101 . 26	Pelatihan penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG	Meningkatnya aparatur SDM paratur dalam penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG	150 Orang	50 Orang	0 Orang	0	0%	0	50 Orang	33%	
4.01 . 101 . 27	Rakornis Pengelola Perbatasan RI-PNG	Rekomendasi Rakornis Pengelolaan Perbatasan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80%	
4.01 . 101 . 28	Pameran Pembangunan Budaya Kawasan Perbatasan	Terinformasinya hasil pembangunan dan budaya kawasan perbatasan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	1 Kegiatan	25%	

4.01 . 101 . 29	Penyusunan pelaporan TP2KOPD	Tersedianya laporan TP2KOPD	60 Dokumen	16 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	16 Dokumen	27%	
4.01 . 101 . 30	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	
4.01 . 101 . 31	Peningkatan Keerampilan Home Industry bagi Masyarakat Kawasan Perbatasan		80 Orang	20 Orang	0 Dokumen	0	0%	0	20 Orang	25%	
4.01 . 101 . 32	Sosialisasi Pengelola Perbatasan SatuAtap		400 Orang	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	100 Orang	25%	
4.01 . 101 . 33	Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan SatuAtap	Jumlah Peserta	2 Orang	1 Orang	0 Orang	0	0%	0	1 Orang	50%	
4.01 . 101 . 34	Pelatihan Manajemen Tingkat Dasar, Lanjut dan Mahir Pembina Garda Batas	Jumlah Peserta	200 Orang	50 Orang	0 Orang	0	0%	0	50 Orang	25%	

4.01 . 101 . 35	Forum SKPD Pengelolaan Perbatasan		400	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	100 Orang	200 Orang	50%	
4.01 . 101 . 36	Kegiatan Pembuatan Media Informasi Peraturan Lintas Batas	Jumlah Media Informasi Peraturan Lintas Batas	2 Media	1 Media	0 Media	0	0%	0	1 Media	50%	
4.01 . 101 . 37	Evaluasi dan Pendampingan ke Daerah Perbatasan	Jumlah Orang Yang Melakukan Pendampingan	4 Orang	1 Orang	0 Orang	0	0%	0	1 Orang	25%	
4.01 . 112	Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan	100 Persen	80 persen	0 Persen	0 Persen	0%	0 Persen	80%	80%	
4.01 . 112 . 1	Border Liaison Meeting (BLM)	Border Liaison Meeting (BLM)	5 Kali Tahun	2 Kali Tahun	1 Kali Tahun	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Kali	80%	

4.01 . 112 . 2	Border Liaison Officer Meeting (BLOM)	Jumlah Liaison Officer Meeting	5 Kali Tahun	2 Kali Tahun	1 Kali Tahun	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Kali	80%	
4.01 . 112 . 3	Penjajakan Kerjasama LuarNegeri	Jumlah Kerjasama	2 Kali Tahun	1 Kali Tahun	0 Kali Tahun	0	0%	0	1 Kali	50%	
4.01 . 112 . 4	Border Trade RI - PNG dan Negera Pasifik Selatan	Jumlah Peserta Pameran	500 Orang Kegiatan	100 Orang Kegiatan	0 Orang	0	0%	0	100 Orang	20%	
4.01 . 112 . 5	Pelayanan Kunjungan TamuNegera	Jumlah kunjungan	120 Kali Tahun	48 Kali Tahun	0 Kali Tahun	0	0%	0	48 Kali	40%	
4.01 . 112 . 6	Pendataan dan Verifikasi WNI asal Papua di PNG	Jumlah WNI asal Papua di PNG	2 Orang	2 Orang	0 Orang	0	0%	0	2 Orang	100%	
4.01 . 112 . 8	Peningkatan Kerjasama Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan	Jumlah Kerjasama	3 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	1 Kegiatan	33%	

4.01 . 112 . 9	Peningkatan Kerjasama LuarNegeri	Jumlah Kerjasama Luar Negeri	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	1 Kegiatan	25%	
4.01 . 112 . 10	Riset dan Pengembangan Konektivitas antar Wilayah dan Kawasan	Jumlah Dokumen Yang di Hasilkan	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	25%	
4.01 . 112 . 14	Peningkatan Kerjasama Sister Province Papua - Yamagata Prefecture	Jumlah kerjasama	4 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	2 Dokumen	50%	
4.01 . 112 . 15	Peningkatan Kerjasama Sister Province	Jumlah kerjasama	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	
4.01 . 112 . 17	Penyusunan MoU Kerjasama Sister Province dengan West Sepik, Madang, Morobe	Jumlah MoU	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	
4.01 . 112 .	Pendataan dan Verifikasi	Jumlah dokumen	1	1 Dokumen	0	0	0%	0	1	100%	

18	Masyarakat Papua yang Berada di Papua Ner Guinea	data dan verifikasi	Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen		
4.01 . 112 . 19	Festival Budaya Melanesia	Jumlah Acara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Dokumen	0	0%	0	1 Kegiatan	10000%	
4.01 . 112 . 20	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperdasi Grand Design Pemulangan Pelintas Batas dari Luar Negeri	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	
4.01 . 112 . 21	Rakornis Pengelola Perbatasan	Jumlah Rapat Koordinasi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0%	0	1 Kegiatan	25%	
4.01 . 112 . 22	Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelola Perbatasan	Jumlah aparatur	40 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0%	0	0	0%	
4.01 . 112 . 23	Sosialisasi Basic Agreement Bagi	Jumlah Dokumen Kerjasama	400 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	0	0%	0	100 Dokumen	25%	

	Masyarakat Perbatasan										
4.01 . 112 . 24	Pembuatan Media Informasi Peraturan Lintas Batas	Jumlah Media Informasi	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	50%	
4.01 . 112 . 25	Joint Verifikasi Pelintas Batas dan Permasalahan Wilayah Perbatasan RI-PNG	Jumlah Dokumen Pelintas batas	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	25%	
4.01 . 112 . 26	Joint Verifikasi Pencemaran Sungai Fly RI-PNG	Jumlah Dokumen Pencemaran sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.01 . 112 . 27	Penanganan Masyarakat Pelintas Batas RI-PNG yang Terkena Musibah	Jumlah Masyarakat yang tertangani	4 Orang	1 Orang	0 Orang	0	0%	0	1 Orang	25%	
4.01 . 112 . 29	Pembinaan Pelintas Batas Tradisional	Jumlah Pelintas batas yang dibina	200 Orang	50 Orang	0 Orang	0	0%	0	50 Orang	25%	

	yang Kembali ke RI										
4.01 . 112 . 30	Pelatihan Penanganan Bencana Alam dan Kecelakaan di RI-PNG	Jumlah Peserta	40 Orang	20 Orang	0 Orang	0	0%	0	20 Orang	50%	
4.01 . 112 . 31	Penyusunan Grand Design Penanganan Pelintas Batas yang kembali dari negara lain	Jumlah Dokumen Grand Design	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0	0%	
4.01 . 112 . 32	Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan Perbatasan	Jumlah Prasarana pengamanan Perbatasan	6 Unit	2 Unit	0 Unit	0	0%	0	2 Unit	33%	

Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua s/d Tahun 2023, seperti yang terlihat pada tabel 2.1 diatas, pencapaian target kinerja sampai dalam tahun 2023, rata-rata mencapai 70% tingkat penyerapannya, namun terdapat program kegiatan yang pencapaian targetnya sangat minim dikarenakan target yang ditetapkan dalam Renstra untuk program tertentu terlalu tinggi, sehingga dana yang dialokasikan tidak mampu menjawab target Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sampai dengan akhir tahun, penyerapan anggaran dalam upaya pencapaian target dan indikator capaian dapat terealisasi sampai 100,00%, artinya apa yang diharapkan dalam pencapaian program kegiatan Badan Pengelola Perbatasan dan kerjasama Provinsi Papua dapat dicapai.

2.2 Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase infrastruktur dasar, ekonomi, sosial dan pemerintahan dikawasa perbatasan yang telah dibangun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemahaman pelintas batasterkait peraturan lintas batas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kawasan potensialperbatasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Presentase kerjasama luar negeriyang diimplementasikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Prov.Papua oleh Inspektorat Provinsi Papua			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2019 tentang Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, yang mempunyai tugas pokok: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi dan melaksanakan kerjasama luar negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama selaku penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu- isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

- a) Sumber Daya Aparatur Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua masih terbatas pada kuantitas, namun sebagian besar belum mempunyai disiplin ilmu sesuai tupoksi kelembagaan terutama yang mampu berbahasa asing, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- b) Etos kerja Aparatur Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua masih belum mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, hal ini tercermin dari perilaku, antara lain kurangnya tanggung jawab dan kesungguhan dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, mengakibatkan penyelesaian tugas-tugas mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu.
- c) Tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih kurang, sehingga data-data yang diperlukan disetiap bagian/bidang belum terdokumentasi dengan baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2024 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua sesuai tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Kerja Pemerintah
SKPD : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua**

RANCANGAN AWAL KEBUTUHAN						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA			17.585.193.158,00			BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA			17.585.193.158,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			17.585.193.158,00			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			17.585.193.158,00	
	PENGLOLAAN PERBATASAN			17.585.193.158,00			PENGLOLAAN PERBATASAN			17.585.193.158,00	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	9.385.193.158,00		1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	9.385.193.158,00	
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	200.000.000,00			Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	200.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				

		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.390.472.100,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.390.472.100,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	51 Orang/ Bulan	3.340.472.100,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	51 Orang/ Bulan	3.340.472.100,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	755.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	755.000.000,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
		<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	10 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	10 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					

		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang	450.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang	450.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	155.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	155.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.198.721.058,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.198.721.058,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	75.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	75.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	325.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	325.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	328.721.058,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	328.721.058,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Fasilitasi Kunjungan Tamu						Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				

		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	515.000.000,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	515.000.000,00	
	Pengadaan Mebel						Pengadaan Mebel				
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket	290.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket	290.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	225.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	225.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	371.000.000,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	371.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	135.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	135.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	955.000.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	955.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	29 Unit	610.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	29 Unit	610.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	35 Unit	115.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	35 Unit	115.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				

		<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	230.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	230.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2,	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	8.200.000.000,00		2,	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	8.200.000.000,00	
	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	-	-	2.200.000.000,00			Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	-	-	2.200.000.000,00	
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah						Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</i>	2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</i>	2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				
		<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>	1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>	1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-	5.000.000.000,00			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-	5.000.000.000,00	
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan						Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan						Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</i>	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</i>	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara						Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Pada Tahun 2023 Badan Pengelola Perbatasan dan kerjasama Provinsi Papua tidak mempunyai program dan kegiatan yang berasal dari usulan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara Di Aruk, Motaain, Dan Skouw.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yaitu koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, dukungan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2022 adalah melakukan koordinasi dengan Pusat dan Daerah baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2019-2024 telah ditetapkan Visi yaitu “PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”.

Maka dalam matriks berikut dijabarkan mulai Misi, Tujuan dan Sasaran, yakni:

Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatkan sistem pemerintahan yang baik
2	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial, dan pemerintah di kawasan Perbatasan	Meningkatkan pelayanan Infrastruktur dasar, ekonomi, sosial dan pemerintah di Kawasan Perbatasan
3	Menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Kawasan Perbatasan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kawasan Perbatasan

- | | | |
|---|---|---|
| 4 | Mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kawasan Perbatasan | Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kawasan Perbatasan |
| 5 | Meningkatkan hubungan kerjasamaluar negeri | Meningkatkan hubungan kerjasama luar negeri dan Negara sahabat yang paling menguntungkan |

Tujuan-tujuan tersebut merupakan bagian integral dalam aktifitas Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan dan operasionalnya.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi

Keberhasilan mencapai berbagai sasaran organisasi lebih menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan instansi berikut unit kerjanya.

Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi sebagai alat untuk memacu agar semua bagian organisasi sadar akan kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang tertentu yang tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Agar sasaran ini efektif, maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, menentang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tujuan – Sasaran

Misi I: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan beribawah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan sistem pemerintah yang baik	1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatnya sarana prasarana kantor 3. Meningkatnya disiplin aparatur 4. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 5. Terwujudnya sistem perencanaan yang efisien dan efektif serta pelaporan kinerja yang akuntabel

Misi II: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial dan pemerintah di Kawasan perbatasan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar, Ekonomi, Sosial dan Pemerintah di Kawasan Perbatasan	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar, Ekonomi, Sosial dan Pemerintah di Kawasan Perbatasan

Misi III: Menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Kawasan Perbatasan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kawasan Perbatasan	Berkurangnya pelanggaran lintas Batas Negara RI-PNG

Misi IV: Mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kawasan Perbatasan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kawasan Perbatasan	Meningkatnya pemanfaatan potensi di Kawasan Perbatasan

Misi V : Meningkatkan hubungan kerjasama luar Negeri

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan hubungan kerjasama luar negeri danNegara sahabat yang saling menguntungkan	Meningkatnya hubungan kerjasama luar negeri yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya

3.3 Program dan Kegiatan

**3.3.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
Provinsi Papua**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua berdasarkan RENSTRA tahun 2024-2026, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
Pemerintah Provinsi Papua

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungglawab	Lokasi
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

5.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	3 dokumen	135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	9.024.842.950,00	1 Tahun	9.024.842.950,00	1 Tahun	9.024.842.950,00	3 Tahun	27.074.528.850,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		135.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian yang diadakan	60 stell	60 stell	150.000.000,00	60 stell	150.000.000,00	60 stell	150.000.000,00	180 stell	450.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	60 stell	60 stell	100.000.000,00	60 stell	110.000.000,00	60 stell	120.000.000,00	180 stell	330.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	9 orang	15 orang	500.000.000,00	15 orang	550.000.000,00	15 orang	600.000.000,00	45 orang	1.650.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 orang	60 orang	100.000.000,00	60 orang	110.000.000,00	60 orang	120.000.000,00	180 orang	330.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	-	15 orang	100.000.000,00	15 orang	100.000.000,00	15 orang	100.000.000,00	45 orang	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	100.000.000,00	20 Jenis	100.000.000,00	20 Jenis	100.000.000,00	60 Jenis	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1. 06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan	20 jenis	20 Jenis	25.000.000,00	20 Jenis	25.000.000,00	20 Jenis	25.000.000,00	60 Jenis	75.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	60 Jenis	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	300.000.000,00	30 Jenis	300.000.000,00	30 Jenis	300.000.000,00	90 Jenis	900.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 Jenis, 120000 Dokumen	15 Jenis, 120000 Dokumen	100.000.000,00	15 Jenis, 120000 Dokumen	100.000.000,00	15 Jenis, 120000 Dokumen	100.000.000,00	45 Jenis, 360000 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7200 eksemplar	7200 eksemplar	80.000.000,00	7200 eksemplar	80.000.000,00	7200 eksemplar	80.000.000,00	21600 eksemplar	240.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan /Material yang disediakan		20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	50.000.000,00	20 Jenis	150.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	24 kali	24 kali	300.000.000,00	24 kali	300.000.000,00	24 kali	300.000.000,00	72 kali	900.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1. 06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	114 OT, 6000 orang/ka li	114 OT, 6000 orang/ka li	1.500.000.0 00,00	114 OT, 6000 orang/ka li	1.500.000.0 00,00	114 OT, 6000 orang/ka li	1.500.000.0 00,00	342 OT, 18 000 orang/ka li	4.500.000.0 00,00		Kota Jayap ura, Keer om, Jayap ura, sarmi , Biak, Supio ri, Jakar ta
0.00.01.1. 06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Pemerintah n Berbasis Elektronik	1 Paket	1 Paket	75.000.000, 00	1 Paket	80.000.000, 00	1 Paket	90.000.000, 00	3 Paket	245.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayap ura
5.06.01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayap ura
0.00.01.1. 07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		3 unit	1.200.000.0 00,00	10 unit	500.000.00 0,00	5 unit	300.000.00 0,00	18 unit	2.000.000.0 00,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayap ura
0.00.01.1. 07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		2 unit	1.000.000.0 00,00	2 unit	1.000.000.0 00,00	2 unit		4 unit	2.000.000.0 00,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayap ura
0.00.01.1. 07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	41 unit	41 unit	400.000.00 0,00	-	-	41 unit	450.000.00 0,00	82 unit	850.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayap ura
0.00.01.1. 07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	21 unit	30 unit	300.000.00 0,00	30 unit	300.000.00 0,00	30 unit	300.000.00 0,00	60 unit	900.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayap ura

0.00.01.1. 07.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah mebeleur yang diadakan		3 unit	300.000.00 0,00	-	-	-	-	3 unit	300.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 07.008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap yang diadakan		1 sistem	50.000.000,00	1 sistem	50.000.000,00	1 sistem	50.000.000,00	3 sistem	150.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan		1 unit	-	1 unit	1.000.000.000,00	-	-	1 unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		3 unit	300.000.00 0,00	-	-	3 unit	300.000.00 0,00	6 unit	600.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3 unit	300.000.00 0,00	-	-	3 unit	300.000.00 0,00	6 unit	600.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	500 surat/do kumen	500 surat/do kumen	20.000.000,00	500 surat/do kumen	20.000.000,00	500 surat/do kumen	20.000.000,00	1500 surat/do kumen	60.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder	12 Rekening	12 Bulan	150.000.00 0,00	12 Bulan	150.000.00 0,00	12 Bulan	150.000.00 0,00	36 Bulan	450.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6 Orang	100.000.00 0,00	6 Orang	100.000.00 0,00	6 Orang	100.000.00 0,00	18 Orang	300.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1. 08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Orang	6 Orang	220.000.00 0,00	6 Orang	220.000.00 0,00	6 Orang	220.000.00 0,00	18 Orang	660.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										-	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit	100.000.00 0,00	1 unit	100.000.00 0,00	1 unit	100.000.00 0,00	3 unit	300.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	40 unit	40 unit	600.000.00 0,00	40 unit	600.000.00 0,00	40 unit	600.000.00 0,00	120 unit	1.800.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel		20 jenis	500.000.00 0,00	20 jenis	500.000.00 0,00	20 jenis	500.000.00 0,00		1.500.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	40 unit	1.000.000.00 0,00	40 unit	1.000.000.00 0,00	40 unit	1.000.000.00 0,00	40 unit	3.000.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap		3 unit	1.000.000.00 0,00		1.000.000.00 0,00		1.000.000.00 0,00		3.000.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		1 sistem	500.000.00 0,00	1 sistem	500.000.00 0,00	1 sistem	500.000.00 0,00		1.500.000.00 0,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura

0.00.01.1. 09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 unit	3 unit	1.000.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	9 unit	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	9 unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
0.00.01.1. 09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	3 unit	500.000.000,00	9 unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	Kota Jayapura
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	2 dokumen	4 dokumen	3.000.000.000,00	4 dokumen	4.000.000.000,00	4 dokumen	4.000.000.000,00	12 dokumen	11.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	tersusunya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000.000,00					1 dokumen	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan								-			Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	

5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 dokumen	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	9 dokumen	9.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 dokumen	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	9 dokumen	9.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	3 dokumen	3 dokumen	3.000.000.000,00	4 dokumen	3.000.000.000,00	4 dokumen	3.000.000.000,00	12 dokumen	9.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.02.04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	terlaksananya Inventarisasi		1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi											Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	

5.06.02.1. 03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1. 03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
5.06.02.1. 03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	3 dokumen	3.000.000.000,00	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama	
Jumlah					40.954.842.950,00	-	38.574.842.950,00	-	37.549.842.950,00	-	117.079.528.850,00		

3.3.2 Rencana Program Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Indikator Kinerja utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2024, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua adalah Sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024

SKPD : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	12	13	15	16	17
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA			17.585.193.158,00					1.520.844.193.158,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			17.585.193.158,00					1.520.844.193.158,00	
	5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN			17.585.193.158,00					1.520.844.193.158,00	
1,	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	9.385.193.158,00				-	1.512.944.193.158,00	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	200.000.000,00		-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

	5.06.01.1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.390.472.100,00		-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	3.390.472.100,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	51 Orang/ Bulan	3.340.472.100,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3.340.472.100,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	755.000.000,00		-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-	760.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	10 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang	450.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		450.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
5.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	155.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		160.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	3.198.721.058,00		-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-	1.506.723.721.058,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	75.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		80.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	325.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		330.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	328.721.058,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		328.721.058,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		95.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		95.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		1.505.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	515.000.000,00		-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	515.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket	290.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		290.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	225.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		225.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	371.000.000,00		-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	385.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	135.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan		140.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan		220.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	955.000.000,00		-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-	970.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	29 Unit	610.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan		615.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	35 Unit	115.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan		120.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									

			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	230.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		235.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
2,	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	8.200.000.000,00				-	7.900.000.000,00	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-	-	2.200.000.000,00		-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</i>	2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan									
			<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>	1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-	5.000.000.000,00		-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.000 1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.000 2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</i>	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.000 3	Fasilitasi Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara									

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama (BPPK) Provinsi Papua untuk mendukung pengelolaan perbatasan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam mendukung program Prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BPPK Provinsi Papua Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPK Provinsi Papua, sebagai berikut:

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, serta mendukung pengelolaan perbatasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua tahun 2024-2026 dan menunjang tercapainya visi dan misi Daerah serta target dan sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai bahan dalam penyusunan usulan Rencana Kegiatan Fasilitasi Pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi Rencana Kerja Tahun lalu serta merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2024.

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan maka RENJA SKPD ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua berkewajiban melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam RENJA SKPD tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam upaya konsistensi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, maka setiap bagian membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing kegiatan berdasarkan RENJA SKPD Tahun 2024;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penganggaran, setiap kepala bagian wajib melakukan pengendalian terhadap Rencana Kerja Anggaran masing- masing kegiatan berdasarkan RENJA SKPD Tahun 2024;
4. Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua akan mengoreksi dan menganalisa hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pembangunan/Kegiatan dari masing-masing bagian;
5. Pada akhir tahun anggaran 2024 setiap kepala bagian wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan yang akan digunakan untuk menyusun laporan tahunan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua Tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup pemerintah Provinsi Papua maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Keberhasilan RENJA SKPD Tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan disiplin aparatur/penyelenggara pembangunan/kegiatan dan para penyedia jasa sebagai partner pemerintah yaitu Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua untuk melakukan kegiatan sungguh-sungguh sehingga mampu memberikan hasil sebaik-baiknya yang dapat dipertanggung jawabkan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adanya RENJA tahun 2024 ini diharapkan agar Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua dapat melaksanakan tugas secara akurat, terarah dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintahdaerah tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.